



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 63 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai dasar dalam menyusun analisis jenis jabatan, kebutuhan jumlah, distribusi pegawai guna mendukung tujuan instansi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 9);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
6. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
7. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan dan ikhtisar jabatan.
8. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.
9. Kode Jabatan adalah kode yang mempresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
15. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
16. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
17. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.

18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
19. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi seginya,
21. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
22. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
23. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
24. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
25. Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
27. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
28. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
29. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka pemetaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan /unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.
- (2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapat informasi jabatan yang dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penyampaian data;
 - c. pengolahan data;
 - d. verifikasi;
 - e. penyempurnaan; dan
 - f. penetapan hasil jabatan dan penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 3

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara:

- a. formulir isian, berupa pengumpulan data dan investarisasi jumlah pemangku jabatan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan langsung; dan/atau
- d. referensi.

Pasal 4

Tujuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah untuk penyusunan kebijakan program :

- a. pembinaan dan penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- f. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- g. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- h. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- i. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- j. program mutasi pegawai dari unit yang kekurangan;
- k. program promosi pegawai;
- l. pemberian penghargaan dan hukuman/sanksi (*reward and punishment*) terhadap unit atau pejabat; dan
- m. bahan penetapan kebijakan bagi pemimpin dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB II

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi yaitu :

- a. Uraian Jabatan;
- b. Peta jabatan;
- c. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektifitas dan efisiensi unit kerja;
- d. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- e. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
- f. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
- g. standar norma waktu kerja.

(2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), meliputi :

- a. identitas jabatan;
- b. ikhtisar jabatan;
- c. kualifikasi jabatan;
- d. tugas pokok;
- e. bahan kerja;
- f. perangkat kerja;

- g. hasil kerja;
- h. tanggung jawab;
- i. wewenang;
- j. korelasi jabatan;
- k. kondisi lingkungan kerja;
- l. resiko bahaya;
- m. syarat jabatan;
- n. prestasi kerja; dan
- o. kelas jabatan.

Pasal 6

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berupa:

- a. Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Sekretariat tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Rekapitulasi Analisis Beban Kerja tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Peta Jabatan di Sekretariat tercantum dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

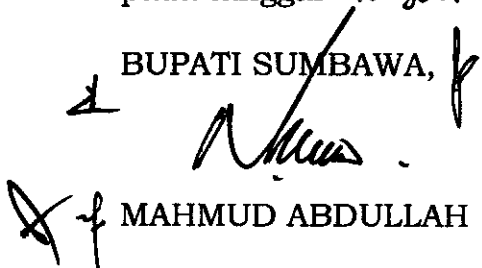
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Juli 2022

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 62

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**I. HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIS
DAERAH**

1. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Sekretariat Daerah
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya : Sekretaris Daerah
 - c. JPT Pratama :
 - d. Administrator :
 - e. Pengawas :
 - f. Pelaksana :
 - g. Jabatan Fungsional :

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin Sekretariat Daerah dengan tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah serta menyiapkan, mengolah, menelaah dan merumuskan rencana kebijakan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

5. Kualifikasi Jabatan

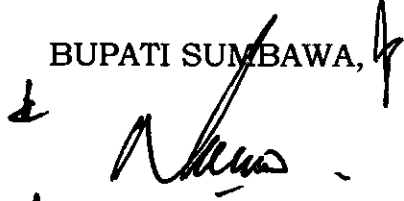
- a. Pendidikan : S1/S2/S3 Ilmu Pemerintahan/Hukum/Ekonomi/Teknik
- b. Kursus/Diklat :
 - 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat II
 - 2) Teknis :
 - a. Diklat Manajemen Kinerja
 - b. Kepemimpinan Diklat Teknis Kepemimpinan Organisasi
 - c. Kepemimpinan Diklat teknis Pengambilan Keputusan
 - d. Diklat Teknis Analisis Manajemen
 - e. Diklat Teknis Perencanaan Sistem Informasi Manajemen
 - f. Diklat Teknis Manajemen Strategik
- c. Pengalaman kerja :

Pernah menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 4 tahun
- d. Pengetahuan kerja :

Pengetahuan secara umum tentang manajemen pemerintah daerah

6. Tugas Pokok :

- 3) O8 : Menerima instruksi
4) B7 : Memegang
16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang konten media sosial pada subbag dokumentasi pimpinan dengan baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
17. Kelas Jabatan : 7

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 63 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		ASN	NON PNS		
1	2	3	4	5	7
1	Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa	1		1	
	- Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1		1	
	- Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	1		1	
	- Staf Ahli Bupati Bid. Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan	1		1	
	- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1		1	
	- Kabag. Pemerintahan	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Administrasi Pemerintahan				
	- JF Analisis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analisis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analisis Pemerintahan Daerah			1	-1
	- Pengelola Administrasi Pemerintahan			2	-2
	- Pengadministrasi Pemerintahan	1	1	3	-1
	Sub Koordinator Bidang Kerjasama dan Otonomi Daerah				
	- JF Analisis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analisis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	1		1	
	- Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		2	2	
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	Sub Koordinator Bidang Administrasi Kewilayahan				
	- JF Analisis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analisis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analisis Toponomi dan Data Wilayah			1	-1
	- Pengelola Toponomi			1	-1
	- Pengelola Data			2	-2
	- Pengadministrasi Umum	1	1	2	
	- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Mental Spiritual				

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		ASN	NON PNS		
1	2	3	4	5	7
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan			1	-1
	- Pengelola Data	1	2	3	
	- Pengadministrasi Umum	1	2	3	
	Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analis kesejahteraan Rakyat			1	-1
	- Pengelola Kesejahteraan Sosial		1	2	-1
	- Pengadministrasi Umum		1	2	-1
	Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analis kesejahteraan Rakyat			1	-1
	- Pengelola Data			2	-2
	- Pengadministrasi Umum			2	-2
	- Kepala Bagian Hukum	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Perundang-undangan				
	- JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama			1	-1
	- JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya			1	-1
	- JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	1		1	
	- JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama			1	-1
	- Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	1		2	-1
	- Analis Produk Hukum			1	-1
	- Pengelola Data	1	1	2	
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	Sub Koordinator Bidang Bantuan Hukum				
	- JF Analis Hukum Utama			1	-1
	- JF Analis Hukum Madya			1	-1
	- JF Analis Hukum Muda			1	-1
	- JF Analis Hukum Pertama			1	-1
	- Penyusun Bahan Bantuan Hukum			1	-1
	- Pengelola Bantuan Hukum			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	Sub Koordinator Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum				
	- JF Analis Hukum Utama			1	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		ASN	NON PNS		
1	2	3	4	5	7
	- JF Analis Hukum Madya			1	-1
	- JF Analis Hukum Muda	1		1	
	- JF Analis Hukum Pertama			1	-1
	- Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			1	-1
	- Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	1		1	-
	- Pengolah Data Informasi dan Hukum			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	1		1	
	- Kapala Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analis Badan Layanan Umum			1	-1
	- Pengolah Data	1		1	
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	Sub Koordinator Bidang Perekonomian				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analis Perekonomian			1	-1
	- Pengolah Data			1	-1
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Penelaah Data Sumber Daya Alam	1		1	
	- Pengolah Data			1	-1
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Kapala Bagian Administrasi Pembangunan	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Penyusunan Program				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analis Rencana Program dan Kegiatan			1	-1
	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1	1	
	- Pengelola Program dan Kegiatan		1	1	
	Sub Koordinator Bidang Pengendalian Program				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1

A7

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		ASN	NON PNS		
1	2	3	4	5	7
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analis Pembangunan	1		1	
	- Pengadministrasi Sistem Informasi			1	-1
	- Pengendalian Pembangunan				
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengolah Data	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Evaluasi Pelaporan				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1		1	
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Pengolah Data			1	-1
	- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
	- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya			1	-1
	- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1		1	
	- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1		1	
	- Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa			1	-1
	- Pranata Barang dan Jasa	3		4	-1
	- Pengolah Data		1	1	
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	1		4	-3
	- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	7		8	-1
	- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama			4	-4
	- Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa			1	-1
	- Pranata Barang dan Jasa			1	-1
	- Pengolah Data			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Layanan Secara Elektronik				
	- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya			1	-1
	- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1		1	
	- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1		1	
	- Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa			1	-1
	- Pengelola LPSE	1	1	2	
	- Pengadministrasi LPSE		1	2	-1
	- Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	1		1	
	- Kepala Bagian Administrasi Umum	1		1	

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		ASN	NON PNS		
1	2	3	4	5	7
	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	1		1	
	- JF Arsiparis Penyelia			1	-1
	- JF Arsiparis Mahir			1	-1
	- JF Arsiparis Terampil			1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Penyelia			1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Mahir			1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Terampil			1	-1
	- Analis Tata Usaha			1	-1
	- Notulis Rapat			1	-1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	1		1	
	- Pengelola Kepegawaian	1		1	
	- Pengadministrasi Persuratan	2		3	-1
	- Pranata Kearsipan	1		2	-1
	- Pengadministrasi Umum	5	7	5	7
	Sub Koordinator Bidang Keuangan				
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Utama			1	-1
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Madya			1	-1
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1		1	
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama			1	-1
	- Bendahara	1		1	
	- Penata Laporan Keuangan	1		1	
	- Penyusun Rencana Keuangan	1		1	
	- Verifikator Keuangan	1		1	
	- Pengolah data	1		2	-1
	- Pengadministrasi Keuangan		3	4	-1
	Sub Koordinator Bidang Rumah Tangga dan Perlengkapan				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- JF Pranata Komputer Penyelia			1	-1
	- JF Pranata Komputer Mahir			1	-1
	- JF Pranata Komputer Terampil			1	-1
	- Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah tangga dan Perlengkapan			1	-1
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasana	1	2	2	1
	- Pengadministrasi umum	1	4	3	2
	- Ajudan	9	1	16	-6
	- Teknisi Peralatan Kantor	1	2	3	
	- Pranata jamuan	2		2	
	- Pengemudi VIP	2		4	-2
	- Pramu Kebersihan	2	49	52	-1
	- Petugas Keamanan			15	-15
	- Pengemudi	11		20	-9

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		ASN	NON PNS		
1	2	3	4	5	7
	- Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor			1	-1
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			1	-1
	- Kepala Bagian Organisasi	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
	- JF Analisis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1		1	-
	- JF Analisis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analisis Kelembagaan	-	-	1	-1
	- Analisis Jabatan	2		3	-1
	- Pengolah Data Kelembagaan	1		1	-
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
	- JF Analisis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Muda			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analisis Pelayanan Publik			1	-1
	- Analisis Tata Laksana	1		1	-
	- Pengolah Data	1		1	-
	- Pengadministrasi Umum		1	1	-
	Sub Koordinator Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
	- JF Analisis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1		1	-
	- JF Analisis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja			1	-1
	- Pengolah Data	1		1	-
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1	-1
	- Kasubbag Protokol	1		1	
	- Penata Acara	1		1	
	- Pranata Acara	2		2	
	- Petugas Protokol			2	-2
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	Sub Koordinator Bidang Komunikasi Pimpinan				
	- JF Analisis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analisis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	1		1	
	- Pengolah Data	1	1	2	
	- Pengadministrasi Umum		1	2	-1
	Sub Koordinator Bidang Dokumentasi Pimpinan				

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		ASN	NON PNS		
1	2	3	4	5	7
	- JF Analisis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1		1	
	- JF Analisis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analisis Konten Media Sosial			1	-1
	- Penata Liputan	1		3	-2
	- Pengelola Dokumentasi	1		2	-1
	- Notulis Rapat	1		1	
	- Jurnalis			2	-2
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	JUMLAH	126	90	396	-180

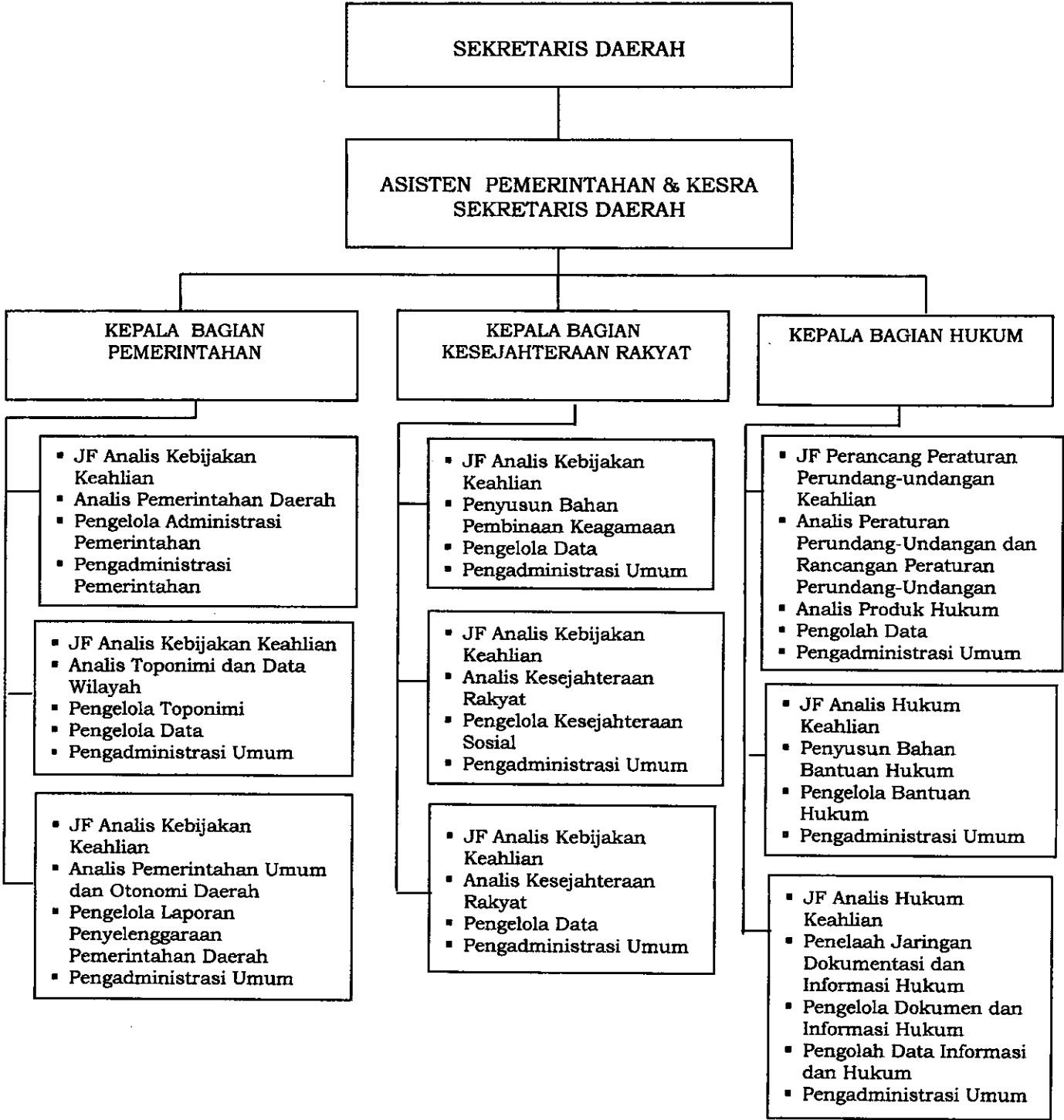
4

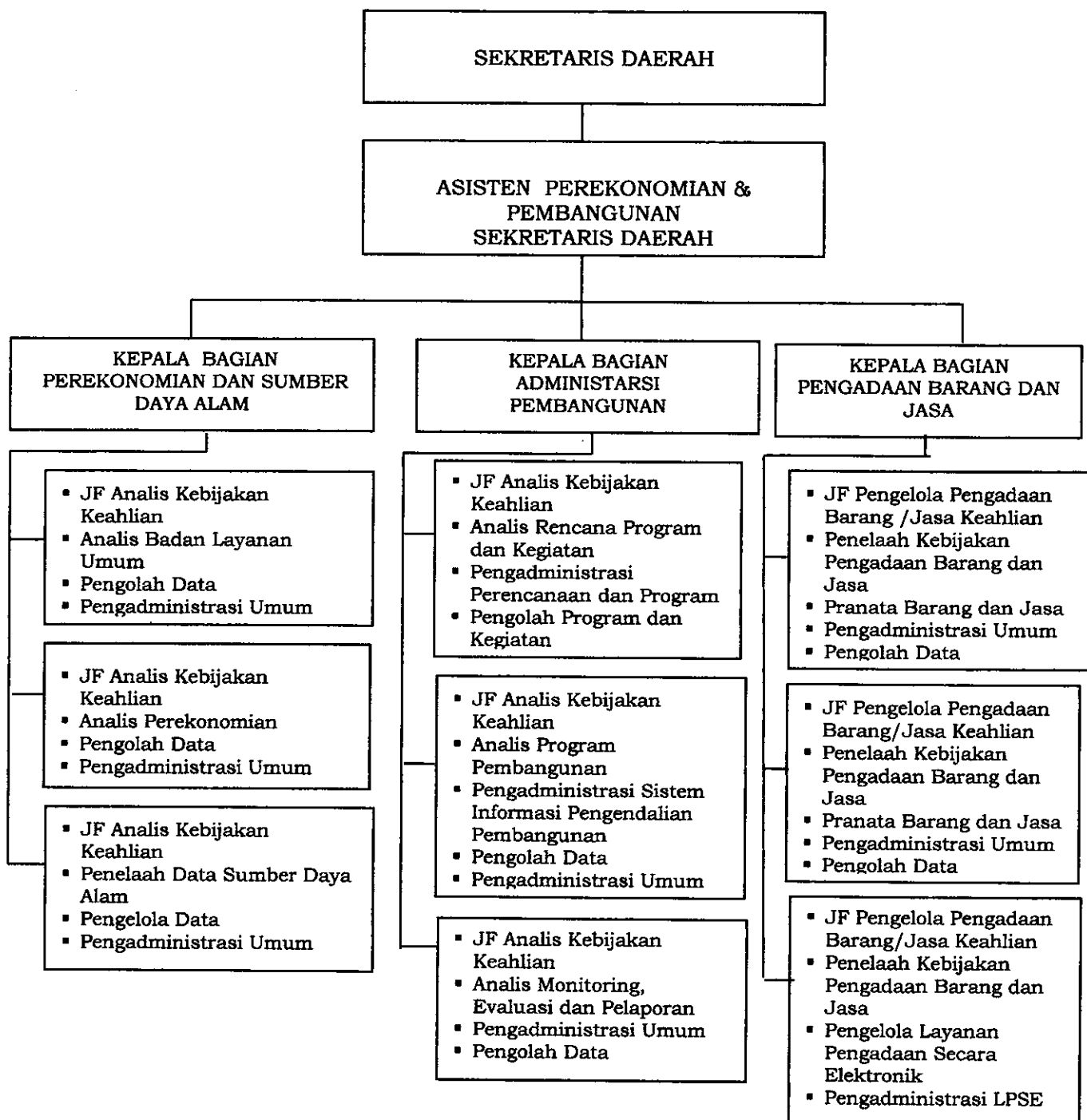
MAHMUD ABDULLAH

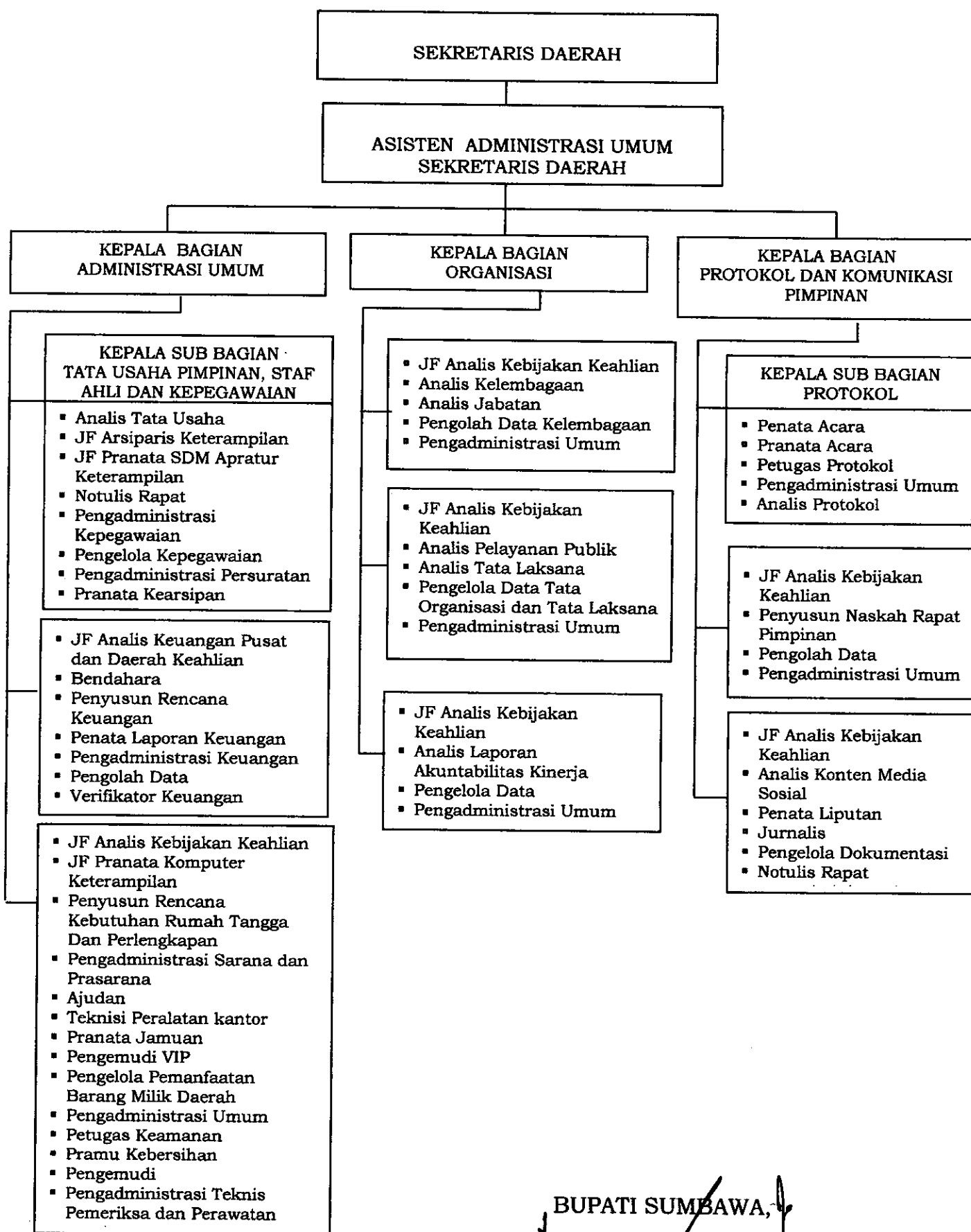
BUPATI SUMBAWA,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

PETA JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA







BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH